

INISIASI INDONESIA MENJADI MEDIATOR BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN ANTARA KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

Oleh: Setia Ratna Dianpuri

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
setia.ratna.2012@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to analyze Prospects of Indonesia as A Mediator for Peace Settlement between North Korea and South Korea. The conflict between North Korea and South Korea still in a ceasefire. Many parties have sought to resolve the conflict between the two Korea, but none of them found the best solution to resolve the conflict. Indonesia one of the country that concern about the conflict between North Korea and South Korea. In conflict resolution field Indonesia has experienced being a mediator for few conflict in ASEAN. Through these sources that support by role theory and peacemaking concept, the author found that Indonesia have a prospect for being a mediator, to resolve the conflict between North Korea and South Korea.

Key Words: Role Theory, Peacemaking Concept, Resolution Conflict, Security Crisis, Susilo Bambang Yudhoyono regime.

PENDAHULUAN

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang tak kunjung mencapai perdamaian ini mengundang beberapa pihak untuk mengamati dan berpendapat bagaimana mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa pihak yang mengusulkan Indonesia untuk mengambil posisi sebagai mediator dalam mewujudkan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perwakilan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (2010-2015) Sidarto Danusubroto, menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bahwa, Indonesia berpeluang menjadi mediator bagi terwujudnya perdamaian Korea Utara dengan Korea Selatan. Tidak hanya dari perwakilan pemerintahan saja, organisasi KONTRAS (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) juga berpendapat bahwa Indonesia dapat memainkan perannya sebagai mediator dalam konflik tersebut, sehingga kedua negara dapat mencapai kesepakatan untuk berdamai.

HUBUNGAN BAIK INDONESIA DENGAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

Tulisan ini akan menjelaskan tentang sejarah hubungan Indonesia dengan Korea Utara dan Korea Selatan sejak mereka saling membuka hubungan diplomatik. Penulis juga akan menjelaskan tentang perkembangan hubungan Indonesia dengan kedua negara, hingga kerjasama-kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Utara dan Korea Selatan, khususnya ketika Indonesia pada masa pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).

Hubungan Diplomatik Indonesia – Korea Utara

Hubungan bilateral Indonesia dengan Korea Utara dimulai saat kedua negara menandatangani nota pembukaaan hubungan konsuler pada tahun 1961. Pada tahun

1964 perwakilan Indonesia di Pyongyang ditingkatkan menjadi kedutaan besar dengan Duta Besar pertama Indonesia untuk Korea Utara dijabat oleh Aham Erningpradja, beliau menjabat sebagai duta besar selama tiga tahun (1964 – 1967).

Hubungan yang telah terjalin hampir 52 tahun lamanya ini tidak lepas dari kedekatan para pemimpin kedua negara dalam berbagai era kepemimpinan. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, Korea Utara dan Indonesia adalah dua negara yang bersahabat baik. Presiden Soekarno sangat dekat dengan Pimpinan Korea Utara Kim Il Sung, bahkan mereka melakukan kegiatan saling kunjung. Pada tahun 1964 Presiden Soekarno berkunjung ke Korea Utara dan sebaliknya untuk membalas kunjungan Presiden Soekarno, Presiden Kim Il Sung mengunjungi Indonesia pada tahun 1965.

Saat kunjungan pertama Presiden Kim Il Sung ke Indonesia, Presiden Soekarno melakukan “diplomasi bunga,” diplomasi tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan antar kedua pemimpin. Pada saat itu Presiden Soekarno mengajak Presiden Kim Il Sung untuk berjalan-jalan menikmati Kebun Raya Bogor, lalu ditengah perjalanan Presiden Kim Il Sung tertarik pada salah satu spesies bunga disana, karena Presiden Kim Il Sung sangat menyukainya Presiden Soekarno menamakan spesies bunga tersebut dengan nama “*Kimilsungia*” yang diambil dari nama Presiden Korea Utara tersebut. Bunga itu lalu dibudidayakan di Korea Utara dan untuk memperingati hubungan Indonesia-Korea Utara, di Pyongyang setiap satu tahun sekali diadakan festival bunga “*Kimilsungia*”. Festival bunga ini juga menjadi festival rakyat Korea Utara, tujuan diadakannya festival ini adalah untuk mengenang mending President mereka Kim Il Sung.

Hubungan baik antara Indonesia dan Korea Utara terus berjalan baik meski terjadi pergantian pemimpin baik di Indonesia maupun di Korea Utara. Indonesia sebisa mungkin menjaga hubungan baiknya dengan Korea Utara dengan melakukan berbagai kerjasama yang dapat mempererat hubungan antara kedua negara, serta memajukan kesejahteraan di masing-masing negara.

Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Presidium Kim Yong Nam menyelenggarakan pertemuan bilateral. Pertemuan ini banyak membahas kerjasama - kerjasama yang disepakati dan akan dilakukan oleh kedua negara baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, maupun bidang social dan budaya.

Pada tahun 2012, Indonesia sepakat untuk memberikan bantuan senilai US\$ 2.000.000 kepada Korea Utara. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengiriman 1465 ton minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini nantinya akan digunakan sebagai bahan makanan campuran dan kemudian akan didistribusikan langsung ke rakyat miskin Korea Utara. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang, Korea Utara. 2015) Kerjasama Indonesia dan Korea Utara tidak hanya saling memberikan bantuan, tapi juga terwujud dalam beberapa kerjasama di bidang lainnya seperti: (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang, Korea Utara. 2015)

- 1) *Memorandum of Understanding Between the Pyongyang City People's Committee of the Democratic People's Republic of Korea and the Government of the Capital City of Jakarta of the Republic of Indonesia Concerning Sister City Cooperation (2007).*
- 2) *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea concerning Cultural Exchange Programme 2007-2009.*
- 3) *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea in the Field of Information (2009).*
- 4) *Arrangement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea on Concerning Cultural Exchange Program (2010).*

- 5) *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea Concerning Joint Information Committee* (2011).
- 6) Partisipasi tahunan Indonesia pada Festival Bunga Kimilsungia dan 2 tahunan pada *April Spring Friendship Art Festival (ASFAF)* dan *International Film Festival (PIFF)* di Pyongyang serta kegiatan bersama antara KBRI Pyongyang dan *Committee for Cultural Relations with Foreign Countries (CCRFC)*.
- 7) Korea Utara juga mengirim 2 (dua) orang diplomatnya untuk mengikuti *The 11th International Training Course for Mid-Career Diplomats* yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemlu RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober - 3 November 2013.

Meski terjadi pergantian Presiden di Indonesia, pemerintah Indonesia yang sekarang dipimpin oleh Presiden Jokowi, tetap menjaga hubungan baiknya dengan Korea Utara. Sampai saat ini Indonesia masih mengirimkan perwakilannya untuk melakukan lawatan ke Korea Utara, begitu pun sebaliknya Korea Utara beberapa kali mengirimkan perwakilannya untuk melakukan lawatan ke Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang juga masih menjalankan misi-misi kerjasamanya dengan pemerintah Korea Utara.

Hubungan Diplomatik Indonesia – Korea Selatan

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Korea Selatan dimulai dengan pembukaan hubungan tingkat konsulat antar kedua negara di Seoul dan Jakarta pada tahun 1966. Pada tahun 1973 hubungan diplomatik kedua negara ditingkatkan ke tingkat Duta Besar, dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan terjalin sangat baik sampai saat ini. (Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. 2015)

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan semakin meningkatkan kerjasamanya dalam

berbagai bidang, diantaranya pada bidang politik, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kebudayaan.

Pada tanggal 04 Desember 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun menandatangani *Joint Declaration on Strategic Partnership*. *Joint Declaration* tersebut mencakup tiga pilar kerjasama yang akan dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan, yaitu: 1) kerjasama politik dan keamanan, 2) kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi; dan 3) kerjasama sosial budaya. Berikut penjabaran dari tiga pilar tersebut: (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. 2014)

Politik

Sejak membuka hubungan diplomatik pada tahun 1966, hubungan politik antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi semakin dekat. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak sekali kunjungan kenegaraan yang dilakukan kalangan petinggi pemerintahan Indonesia ke Korea Selatan dan juga petinggi pemerintahan Korea Selatan ke Indonesia. Tahun 2008 diadakan KTT Korea-Indonesia.

Salah satu bentuk kerjasama politik yang terbentuk dari hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan adalah dengan ditandatanganinya *Joint Declaration on Strategic Partnership* pada tahun 2006. Melalui kerjasama tersebut hubungan politik Indonesia dan Korea Selatan semakin meningkat, baik Presiden Indonesia maupun Presiden Korea Selatan saling melakukan kunjungan kenegaraan.

Hubungan politik Indonesia dan Korea Selatan tidak hanya sebatas pada hubungan bilateral saja tapi juga dalam hubungannya di wilayah regional dengan ASEAN. Indonesia sering membantu Korea Selatan dalam menjembatani hubungannya dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Ekonomi

Untuk mewujudkan *Joint Declaration on Strategic Partnership* yang telah disepakati dan ditandatangani Indonesia dengan Korea Selatan, dalam bidang ekonomi Indonesia dan Korea Selatan membentuk *Indonesia-Korea Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC) dan menyelenggarakan pertemuan tahun sejak 2007. Kemudian pada tahun 2011 JTF-EC ini direvitalisasi menjadi *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM). (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. 2014)

Pada tanggal 28 Februari 2012 *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) ini melakukan upacara peresmian sekretariat kepengurusan *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM) di Jakarta. Semenjak peresmian sekretariat WLTFM tersebut nilai investasi Korea Selatan di Indonesia terus meningkat.

Pada tahun 2013 nilai investasi Korea Selatan ke Indonesia mencapai USD 2.200.000.000 hal tersebut menempatkan Korea Selatan sebagai investor terbesar ke-4 di Indonesia setelah Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat. (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. 2014) Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dari kedua negara untuk emningkatkan kerjasama ekonominya. Investasi Korea Selatan di Indonesia paling banyak bergerak di bidang elektronik, telekomunikasi, dan otomotif.

Kerjasama ini membawa angin segar bagi perkembangan industri dan perekonomian tanah air. Indonesia juga menjadi negara yang mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari investor-investor besar dari Korea Selatan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Kebudayaan Dan Pariwisata

Pada bidang kebudayaan dan pariwisata, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani MoU dalam bidang pariwisata pada tahun 2006. Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut di Yogyakarta diadakan Pertemuan Komite Budaya Indonesia Korea Selatan.

Pada tahun 2013 saat melakukan kunjungan ke Jakarta, Presiden Korea Selatan Park Geun Hye dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani MoU kerjasama dalam bidang industri kreatif. Kerjasama tersebut mencakup bidang kesenian, kerajinan, musik, film, dan video games.

Melalui kerjasama tersebut warga negara Korea Selatan yang melakukan kunjungan ke Indonesia semakin meningkat. Dampak dari kerjasama tersebut juga mendatangkan angin positif pada industri seni dan film di Indonesia. Pada acara peringatan 40 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 2013, diadakanlah acara Gala Dinner di hotel Lotte Seoul. Acara tersebut dihadiri sekitar 400 undangan. Dalam Gala Dinner tersebut diadakan pagelaran Batik Fashion Show oleh Alleira dimana artis Indonesia Anisa Pohan didapuk sebagai model utamanya. Tidak hanya itu kelompok angklung “Daeng Udjo” juga menjadi penampil dalam acara tersebut.

Dalam bidang perfilman, tahun 2013 Indonesia berhasil mengadakan Festival Film Indonesia di bioskop CGV Seoul. Ada sekitar 9 film Indonesia yang diputar selama 10 hari di bioskop CGV yang tersebar di kota Seoul dan Ansan. Kerjasama tersebut telah membawa industri seni dan pariwisata Indonesia semakin dikenal di negara Ginseng tersebut. Hal tersebut adalah hal positif bagi Indonesia, melalui promosi tersebut akan semakin banyak warga asing terutama dari Korea Selatan yang akan datang ke Indonesia. Arus investasi juga akan semakin deras masuk ke Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai negara yang bagus untuk berinvestasi.

Ketenagakerjaan

Korea Selatan kini tumbuh menjadi negara industri yang sangat maju, dengan semakin berkembangnya industri-industri di Korea Selatan, semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan sektor-sektor industri tersebut. Tingkat kemakmuran warga Korea Selatan semakin meningkat, sehingga sedikit masyarakat Korea Selatan yang tidak mau bekerja pada sektor industri yang masuk dalam kategori *dangerous*, *dirty*, dan *difficult* (3D), atas dasar permasalahan itulah

Korea Selatan sangat memerlukan tenaga kerja tambahan dari luar negeri agar sektor industri mereka tetap berjalan.

Indonesia sendiri telah mengirimkan tenaga kerjanya ke Korea Selatan sejak tahun 1994. Tahun 2004 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani MoU EPS (*Employment Permit System*), MoU tersebut telah diperpanjang dua kali pada tahun 2008 dan 2012. Di Indonesia pengiriman TKI ke Korea Selatan ini ditangani oleh BNP2TKI. Hal tersebut salah satu bentuk kerjasama G to G antara Korea Selatan dengan Indonesia.

Pada akhir tahun 2014, jumlah tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan berjumlah sekitar 35.000 orang. Di Indonesia sendiri ada sekitar 50.000 warga negara Korea Selatan yang bekerja pada berbagai sektor pekerjaan, ini membuktikan adanya keberhasilan dalam kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Korea Selatan.

POSISI INDONESIA DALAM KONFLIK ANTARA KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kedekatan yang cukup baik dengan Korea Utara dan juga Korea Selatan. Indonesia juga adalah salah satu negara yang cukup berperan aktif dalam perdamaian dunia. Pada tulisan ini, penulis akan menganalisis tentang posisi Indonesia dalam konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan sudah berlangsung cukup lama. Banyak sekali upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai pihak dari internal Korea Utara dan Korea Selatan sendiri, serta bantuan dari pihak eksternal baik dari negara sahabat maupun lembaga internasional seperti PBB dan ASEAN, namun belum ada yang berhasil untuk menyelesaikan konflik antar kedua negara tersebut.

Indonesia sendiri adalah salah satu negara yang selalu mengamati perkembangan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Beberapa pihak menginisiasi Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik Semenanjung Korea

tersebut. Penulis akan menganalisis posisi Indonesia terhadap konflik Korea Utara dan Korea Selatan dalam beberapa aspek, hal ini juga untuk menganalisis hal –hal yang mendasari adanya inisiasi kepada Indonesia untuk menjadi mediator konflik di Semenanjung Korea ini.

Netral

Indonesia adalah negara yang menganut sistem Politik Luar Negeri Bebas Aktif, di mana sistem politik ini menjelaskan kedudukan Indonesia dimata internasional. Sistem Politik Luar Negeri Bebas Aktif ini dicetuskan oleh Wakil Presiden Indonesia pertama, Bapak Mohammad Hatta.

Bebas yang dimaksud dalam sistem politik luar negeri ini adalah politik luar negeri Indonesia terbebas dari pengaruh negara atau kekuatan asing, serta bebas menentukan sikap yang didasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sedangkan aktif disini berarti, Indonesia akan aktif mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri yang dianut Indonesia ini, telah ditetapkan juga pada Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dalam konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini Indonesia berusaha untuk menggunakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, agar Indonesia tetap bisa menjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua *disputing parties*. Ketika beberapa negara mulai menjauhi Korea Utara karena menganggap Korea Utara terlalu berbahaya, Indonesia tidak terpengaruh. Indonesia tetap menjaga hubungan baiknya dengan Korea Utara.

Ketika Korea Utara di berikan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB melalui beberapa resolusi yang dikeluarkannya seperti Resolusi 1874 pada tahun 2009 dan Resolusi 2087 dan Resolusi 2094 pada tahun 2013, Indonesia tetap melanjutkan kerjasamanya dengan Korea Utara. Beberapa kerjasama yang tidak dihentikan

Indonesia ketika Korea Utara mendapat sanksi dari Dewan Keamanan PBB antara lain:

- a) *Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea concerning Cultural Exchange Programme 2007-2009.*
- b) *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic People's Republic of Korea in the Field of Information (2009).*
- c) Partisipasi tahunan Indonesia pada Festival Bunga Kimilsungia dan 2 tahunan pada *April Spring Friendship Art Festival (ASFAF)* dan *International Film Festival (PIFF)* di Pyongyang serta kegiatan bersama antara KBRI Pyongyang dan *Committee for Cultural Relations with Foreign Countries (CCRFC)*.
- d) Korea Utara juga mengirim 2 (dua) orang diplomatnya untuk mengikuti *The 11th International Training Course for Mid-Career Diplomats* yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemlu RI di Jakarta pada tanggal 20 Oktober - 3 November 2013.

Jika kita melihat tahun dimana kerjasama itu disepakati, kita akan mengetahui bahwa ketika kerjasama tersebut disetujui oleh Indonesia dan Korea Utara, Korea Utara sedang berada dalam keadaan diberikan sanksi dari Dewan Keamanan PBB karena percobaan senjata nuklirnya. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia tidak berusaha menjauhi Korea Utara, tetapi Indonesia tetap menjaga hubungan baiknya dengan Korea Utara.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Pyongyang juga tidak menghentikan aktifitasnya ketika Korea Utara mendapatkan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB. KBRI Pyongyang tetap menjalankan tugas-tugas kedutaannya, untuk memastikan agar kerjasama yang telah disepakati Indonesia dengan Korea Utara tidak terhambat oleh penjatuhan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara. Begitu juga Kedutaan Besar Korea Utara yang berada di Indonesia, mereka

tetap menjalankan aktifitas kerjasamanya dengan Indonesia meski terkena sanksi Dewan Keamanan PBB.

Meski Indonesia tetap menjalankan berbagai kerjasamanya dengan Korea Utara dan hubungan kedua negara menjadi semakin baik, bukan berarti hubungan Indonesia dengan Korea Selatan menjadi terganggu. Indonesia tetap menjaga keseimbangan hubungannya dengan Korea Utara dan Korea Selatan.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan tetap berjalan dengan baik bahkan semakin baik. Ketika Korea Utara mendapatkan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, ditahun yang sama Indonesia juga membuat banyak kerjasama baru dengan Korea Selatan di beberapa bidang. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam beberapa kesepakatan seperti: (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009)

- a) *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* (2006).
- b) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Ministry of Commerce, Industry and Energy of the Republic of Korea on Cooperation on the Promotion of Nuclear Power Plant in Indonesia* (2006).
- c) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia and the Ministry of Security and Public Administration of the Republic of Korea on Cooperation in the Area of E-Government* (2013).
- d) *Memorandum of Understanding between the Ministry of Administrative Reform of the Republic of Indonesia and the Ministry of Security and Public Administration of the Republic of Korea on Cooperation in the Area of Administrative Reform* (2013).

Hubungan baik antara Indonesia dengan Korea Selatan juga dibuktikan dengan permintaan bantuan dari Korea Selatan kepada Indonesia, untuk menjembatani komunikasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara.

“Korsel minta Indonesia menjadi pembawa pesan untuk dua persyaratan tersebut agar segera dipenuhi oleh Korut. Apabila dua aturan itu diikuti maka Korsel siap memberikan dukungan ekonominya bagi Korut,” ujar Wakil Ketua DPR Korsel, Park Byeong-seug di Hotel Borobudur, Kamis 16 Mei 2013, usai menghadiri acara Indonesia-Korea Forum. (Viva.co.id. 2013)

Sikap Indonesia terhadap Korea Utara dan Korea Selatan sangat berbeda dengan sikap Amerika Serikat dan China dalam menyikapi konflik Semenanjung Korea serta menjalin hubungan dengan *disputing parties*. Amerika Serikat cenderung memihak dan membantu Korea Selatan, sedangkan China adalah sekutu terkuat Korea Utara. Sikap tersebut sangat berbeda dengan sikap Indonesia yang selalu menjaga keseimbangan hubungan baiknya baik dengan Korea Utara maupun Korea Selatan.

Amerika Serikat adalah sekutu terdekat Korea Selatan. Kedua negara ini sering melakukan latihan militer bersama. Contohnya pada tahun 2013, Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer bersama yang mengakibatkan geramnya Korea Utara. Korea Utara menganggap latihan militer bersama tersebut adalah sebuah strategi yang disiapkan Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk menyerang Korea Utara. Latihan militer tersebut melibatkan sekitar 10.000 tentara baik dari Amerika Serikat maupun dari pihak Korea Selatan. (BBC Indonesia. 2013)

Sebaliknya hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara sangat berbanding terbalik dengan hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Amerika Serikat adalah musuh besar Korea Utara. Beberapa kali Kim Jong Un mengatakan dalam pidatonya bahwa Korea Utara akan menyerang Amerika Serikat sampai tak bersisa melalui rudal-rudalnya. Salah satu petikan pidato Kim Jong Un tentang kebenciannya terhadap Amerika:

"Hilang selamanya zaman AS memeras kita dengan nuklir. Sekarang AS bukan lagi sumber ancaman dan ketakutan bagi kita dan kita telah menjadi sumber ketakutan bagi mereka,"
ujar Kim dalam pidatonya. (CNN Indonesia. 2015)

China sendiri telah kita ketahui bersama bahwa negara ini memang sudah lama dekat dengan Korea Utara. Pada Juli 1961, persekutuan China-Korut dikukuhkan dengan penandatanganan Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Imbal-Balik (*Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance*). Isinya antara lain saling memberikan bantuan militer apabila salah satu dari kedua negara diserang, menghormati dan tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, serta melakukan kerjasama bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. (Fitria, Devi. 2015). Sejak saat itulah China menjadi sekutu Korea Utara.

Perbedaan sikap Indonesia tersebut dipengaruhi juga oleh Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang dianut Indonesia, sehingga Indonesia dapat dianggap lebih netral dalam konflik Semenanjung Korea ini, dibandingkan Amerika Serikat dan juga China. Pada konsep mediasi, disitu terdapat kriteria sebuah negara dapat menjadi mediator konflik. Salah satu kriteria yang dibutuhkan adalah *netral*, dan Indonesia memiliki posisi yang netral dalam konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan ini.

Pengalaman Indonesia Sebagai Mediator

Indonesia adalah salah satu negara di ASEAN yang memiliki *track record* yang baik dalam menjadi mediator konflik selain Malaysia. Indonesia pernah memainkan perannya sebagai mediator dalam beberapa konflik internasional, terutama yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN.

Konflik Antara Thailand Dan Kamboja.

Konflik antara Thailand dan Kamboja sudah berlangsung cukup lama. Konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut adalah konflik perbatasan. Pada tahun 2011 konflik antar kedua negara ini semakin memanas dengan adanya baku tembak antara

tentara-tentara kedua negara yang berkonflik ini. Tidak lama berselang Indonesia yang saat itu menjadi ketua ASEAN mengadakan pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, pada 22 Februari 2011 untuk membahas konflik antara Thailand dan Kamboja tersebut.

Hanya satu hari setelah terjadinya baku tembak, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa melakukan “*shuttle diplomacy*” menemui Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersamaan dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski kawasan konflik seluas 4,6 km² yang diperebutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata (Nugraha, Pepih. 2011).

Konflik Antara Mnlf (Moro National Liberation Front) Dan Pemerintah Filipina.

Masalah Filipina Selatan pada awalnya merupakan isu domestik Filipina yang dilatar belakangi oleh perjuangan Bangsamoro yang ingin membentuk negara tersendiri. Gerakan ini mulai terorganisasi pada awal tahun 1970-an setelah lahirnya *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang dipelopori oleh Prof. Nur Misuari (dosen *University of Philippines*) yang kemudian menjadi ketua organisasi dimaksud. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009)

Masalah minoritas muslim di Filipina Selatan mulai mendapat perhatian Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada saat Konferensi Tingkat Menteri ke-3 OKI (KTM ke-3 OKI) di Jeddah, Arab Saudi, Maret 1972. Masalah tersebut dibahas di bawah mata agenda mengenai *Muslim Communities and Minorities*. Pada KTM OKI ke-4 di Benghazi, Libya, pada tanggal 24 - 26 Maret 1973 dibentuk *Quadripartite Committee* (terdiri atas Libya, Arab Saudi, Senegal dan Somalia) untuk membantu

menyelesaikan masalah di Filipina Selatan. Indonesia sejak awal telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan Organisasi Konferensi Islam (OKI) terkait pembahasan isu Filipina Selatan dimaksud, antara lain selaku anggota Komite-6 OKI yang bentuk pada saat KTM OKI ke-20 di Istanbul, Turki, pada tanggal 4 - 8 Agustus 1991. Komite-6 pada perkembangannya menjadi Komite-8, di mana sejak tahun 1993 Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi Ketua Komite-8. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009)

Proses perundingan Pemerintah Filipina (*the Government of the Republic of Philippines/GPH*) dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang difasilitasi OKI dalam format tripartite pada masa lalu telah menghasilkan *Final Peace Agreement* (FPA) atau Perjanjian Damai (PD) 1996. (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2009). Data diatas membuktikan bahwa Indonesia berhasil memainkan peranannya sebagai mediator konflik, di beberapa konflik yang melibatkan negara-negara di ASEAN. Hal tersebut juga membuktikan *capability* Indonesia sebagai mediator konflik.

PENUTUP

Indonesia adalah salah satu negara yang di inisiasikan beberapa pihak untuk menjadi mediator konflik, antara Korea Utara dan Korea Selatan. Inisiasi ini muncul karena pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa Indonesia memiliki prospek yang baik untuk menjadi mediator konflik di Semenanjung Korea. Ada tiga hal yang menjadi didasar mengapa Indonesia dianggap memiliki prospek untuk menjadi mediator konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan

Pertama, Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kedua negara yang berkonflik, baik dengan Korea Utara maupun dengan Korea Selatan. *Kedua*, dalam konflik Semenanjung Korea ini Indonesia *netral*. Indonesia tidak memihak ke Korea Utara maupun ke Korea Selatan. Sikap ini berbeda dengan sikap dua negara *super power* seperti China dan Amerika Serikat. *Ketiga*, Indonesia memiliki

pengalaman yang sangat membanggakan dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Beberapa konflik antar negara di ASEAN pernah ditangani oleh Indonesia.

REFERENSI

Buku:

- Elzabar, Sarjono. 2012. *Kamus Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Mas'ood, Mohtar. & Yoon, Yang Seung. 2005. *Memahami Politik Korea*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yoon, Yang Seung. & Setiawati, Nur Aini. 2003. *Sejarah Korea: Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yoon, Yang Seung. 2005. *40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia – Korea Selatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal:

- Bimantara, Johannes Galuh. 2012. *Peningkatan Hubungan Indonesia-Korea Selatan dan Harapan Penyelesaian Konflik Semenanjung Korea*. Institute of International Studies (IIS UGM) | Volume 12 | Issue 3.
- Galtung, J. 1976. *Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. In J. Galtung (ed.) *Peace, War, and Defense: Essays in Peace Research Vol. II*. Copenhagen: Christian Ejlertsen, pp. 282-304.
- Joint Communiqué 46th ASEAN Foreign Ministers' Meeting Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 29 – 30 June 2013.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1718 Tahun 2006
- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1874 Tahun 2009
- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2087 Tahun 2013
- Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2094 Tahun 2013
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Wulansari, Ica. 2007. *Pengaruh Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Dengan Jepang*.

Internet/Website:

- Adzani, Fadli. 2015. *Indonesia Siap Mediasi Konflik Korsel-Korut Jika Diminta*. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150824190904-106->

- 74189/indonesia-siap-mediiasi-konflik-korsel-korut-jika-diminta/. Diakses pada 04 Oktober 2015.
- Armandhanu, Denny & Dewi, Santi. 2013. *Parlemen Koresel Minta Indonesia Jadi Pembawa Pesan Ke Korut*. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/413390-parlemen-korsel-minta-indonesia-jadi-pembawa-pesan-ke-korut>. Diakses pada 06 Oktober 2015.
- Astro, Masuki M. 2013. *Swiss Tawarkan Mediasi dengan Korea Utara*. ANTARA News Jawa Timur. <http://www.antarane.ws.com/berita/367587/swiss-tawarkan-mediiasi-korea-utara>. Diakses pada 6 Oktober 2015.
- BBC Indonesia. 2013. *Latihan Militer AS – Korsel Berakhir*. http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/04/130430_korea_latihan_militer. Diakses pada 20 Maret 2016.
- Bercovitch, Jacob. "International Mediation and Intractable Conflict." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: January 2004 <<http://www.beyondintractability.org/essay/med-intractable-conflict>>. Diakses pada 05 Oktober 2015.
- Brahm, Eric and Heidi Burgess. "Shuttle Diplomacy." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: November 2003 <<http://www.beyondintractability.org/essay/shuttle-diplomacy>>. Diakses pada 16 Februari 2016.
- CIA (*Central Intelligence Agency*) United States. 2015. *The World Factbook*. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html>. Diakses pada 4 Oktober 2015.
- CNN Indonesia. 2015. *Korut Ancam Bom AS dengan Nuklir Hingga Tidak Tersisa*. <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150728114038-113-68552/korut-ancam-bom-as-dengan-nuklir-hingga-tidak-tersisa/>. Diakses pada 20 Maret 2016.
- Fitria, Devi. 2015. *Persepsi China tentang Korea Utara*. <http://historia.id/mondial/persepsi-china-tentang-korea-utara>. Diakses pada 20 Maret 2016.
- Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. 2015. *Sejarah Hubungan Diplomatik*. <http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp>. Diakses pada 23 Februari 2016.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Pyongyang, Korea Utara. 2015. *Bilateral RI – Korea Utara*. <http://www.kemlu.go.id/pyongyang/id/Pages/Korea-Utara.aspx>. Diakses pada 23 Februari 2016.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. 2014. *Bilateral RI – Korea Selatan*. <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/indokor>. Diakses pada 23 Februari 2016.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI). 2009. *Isu-Isu Khusus: Indonesia dan Perdamaian Filipina - MNLF*. <http://portal.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=26&l=id>. Diakses pada 20 Maret 2016.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI). 2009. *Kedutaan/ Konsulat*. <http://www.kemlu.go.id/Pages/Mission.aspx?l=id>. Diakses pada 04 Oktober 2015.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI). 2009. *Sejarah Korea Utara*. <http://www.kemlu.go.id/pyongyang/id/profil.aspx>. Diakses pada 24 Februari 2016.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI). 2009. *Treaty Database*. [http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty\[country_id\]=68&Treaty\[work_type_id\]=1](http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty[country_id]=68&Treaty[work_type_id]=1). Diakses pada 2 Maret 2016.
- Korean Broadcasting System (KBS) World Radio. 2013. *Isu Nuklir Korea Utara*. http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.htm. Diakses pada 29 Desember 2015.
- Nugraha, Pepih. 2011. *Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja*. http://internasional.kompas.com/read/2011/02/22/17270840/Penyelesaian_Konflik.Thailand-Kamboja. Diakses pada 24 Januari 2016.
- The CTBTO'S. 2013. *On The CTBTO'S Detection in North Korea*. <http://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2013/on-the-ctbtos-detection-in-north-korea/>. Diakses pada 20 Desember 2015.
- Viva.co.id. 2013. *Parlemen Korsel Minta Indonesia Jadi Pembawa Pesan ke Korut*. <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/413390-parlemen-korsel-minta-indonesia-jadi-pembawa-pesan-ke-korut>. Diakses pada 06 Oktober 2015.